



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 11 Maret 2016 No. 20

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)**

**BIDANG : BUMN/BUMD**

**LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : Ir. ENDRO RAHARDJO, M.T.
2. Jabatan : GENERAL MANAGER - INFORMATION TECHNOLOGY - DIREKTORAT TEKNIK - PT KAI COMMUTER JABODETABEK
3. NIK : 93903
4. Alamat Kantor : Jl. IR. H. JUANDA NO. 1, JAKARTA PUSAT
5. Tanggal Pelaporan : 20 Agustus 2013, 20 Nopember 2014

Status Laporan

20 Agustus 2013	20 Nopember 2014
-----------------	------------------

**II. DATA HARTA**

**A. HARTA TIDAK BERGERAK  
(TANAH DAN BANGUNAN)**

1. Tanah & Bangunan seluas 90 m2 & 36 m2, di Kota BANDUNG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2007
2. Tanah & Bangunan seluas 122 m2 & 52 m2, di Kota BANDUNG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011

	20 Agustus 2013	20 Nopember 2014
	Rp. 540.000.000	Rp. 540.000.000
1.	Rp. 140.000.000	Rp. 140.000.000
2.	Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000

**B. HARTA BERGERAK**

**III. HUTANG**

1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN  
UANG

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN  
( II - III )**

	1 Februari 2013	1 September 2013
Rp.	85.000.000	Rp. 85.000.000
Rp.	85.000.000	Rp. 85.000.000
Rp.	868.354.051	Rp. 917.092.281
<b>USD</b>	<b>3.000</b>	<b>USD 3.000</b>

Jakarta, 3 Juni 2014

MENGETAHUI,  
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN  
PLH. DEPUTI

DIREKTORAT PENDAFTARAN  
DAN PEMERIKSAAN LHKPN  
PLH. DIREKTUR

**TTD**

**RONI DWI SUSANTO**

**TTD**

**M. NAJIB WAHITO**

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.